

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH PADA PASAR TUAH SERUMPUN TUALANG KABUPATEN SIAK

Reza Mulya Safutra¹ Nurman²

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kaharuddin Nasution No. 133 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia
rezamulyasafutra@student.uir.ac.id nurman07@soc.uir.ac.id

Abstract

Waste management is a critical issue that directly impacts environmental quality and public health, particularly in traditional market areas with high activity levels. This study aims to determine the implementation of waste management policies at Tuah Serumpun Tualang Market in Siak Regency and to identify the inhibiting factors. The research approach used was descriptive qualitative, with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Research informants included the Head of the Environmental Agency, the Head of the Market Management Office for Region III of Tualang and Sungai Mandau Districts, environmental monitoring staff, cleaning staff, traders, and market visitors. The results indicate that the implementation of waste management policies based on Siak Regency Regional Regulation Number 11 of 2012 has not been optimal. Obstacles identified include a lack of coordination between agencies, a lack of waste collection facilities (TPS), a limited number of cleaning staff and waste collectors, and low community participation. Therefore, improvements in communication aspects, additional resources, strengthening the disposition of implementers, and improving the bureaucratic structure are needed to support effective policy implementation.

Keywords: Policy Implementation, Waste Management, Traditional Market, Regional Regulation, Public Administration

Abstrak

Masalah pengelolaan sampah menjadi isu penting yang berdampak langsung pada kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat, khususnya di area pasar tradisional yang memiliki intensitas aktivitas tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Pasar Tuah Serumpun Tualang Kabupaten Siak serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Korwil III Kecamatan Tualang Dan Sungai Mandau, staf pengawas lingkungan hidup, petugas kebersihan, pedagang, dan pengunjung pasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2012 belum berjalan optimal. Hambatan yang ditemukan antara lain kurangnya koordinasi antarinstansi, minimnya fasilitas tempat penampungan sampah (TPS), terbatasnya jumlah petugas kebersihan dan pengangkut sampah, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam aspek komunikasi, penambahan sumber daya, penguatan disposisi pelaksana, dan perbaikan struktur birokrasi guna mendukung implementasi kebijakan secara efektif.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah, Pasar Tradisional, Perda Kabupaten Siak, Administrasi Publik

PENDAHULUAN

Permasalahan lingkungan hingga hari ini semakin kompleks, serta sangat menarik untuk diperbincangkan dan dicari solusinya terkait isu-isu lingkungan. Dimana permasalahan lingkungan yang meliputi berbagai segala aspek skala, mulai dari skala internasional hingga ke skala pelosok desa, termasuk isu pemanasan global, banjir, dan permasalahan lingkungan lainnya. Semua isu tersebut dapat menjadi suatu ancaman bagi

seluruh makhluk hidup, termasuk manusia itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran manusia untuk bertindak terhadap permasalahan lingkungan. Sebab, ketika ancaman seperti isu lingkungan dibiarkan secara berlarut-larut, akan menyebabkan kerusakan yang parah dan semakin meningkatkan risiko terhadap keberlangsungan hidup manusia.

Ada beberapa faktor yang dapat menimbulkan permasalahan lingkungan, salah satu faktor penyebabnya adalah sampah. Sampah menjadi suatu masalah yang tidak pernah lepas dari permasalahan di setiap negara baik dikota maupun didesa. Dengan banyaknya aktivitas manusia, produksi sampah meningkat, masih rendahnya kesadaran masyarakat dan dukungan untuk pengelolaan sampah, serta minimnya infrastruktur dan fasilitas sampah yang tidak memadai, menjadi tantangan bagi pemerintah dalam mengelola sampah secara berkelanjutan.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 menyebutkan definisi sampah merupakan sisa dari kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan sampah secara umum didefinisikan sebagai hasil dari kegiatan manusia atau fenomena alam yang sudah tidak dimanfaatkan lagi dan akhirnya dibuang ke alam sekitar. Pengertian tersebut mengarahkan bahwa sumber sampah adalah berasal dari kegiatan masyarakat itu sendiri, berdasarkan undang-undang itu pula menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak dan kewajiban dalam pengelolaan sampah.

Sampah merupakan permasalahan lingkungan yang terus menjadi tantangan yang serius bagi pemerintah, terutama di daerah perkotaan dan pusat-pusat umum. Salah satu tempat umum penyumbang sampah terbesar dalam kehidupan adalah pasar. Pasar merupakan salah satu wadah perekonomian pedagang dan sebagian masyarakat, dengan adanya pasar dapat meningkatkan retribusi daerah, menyerap tenaga kerja dan mempermudah warga sekitar membeli kebutuhan pangan sehari-hari.

Dalam pengertian sederhana, pengertian pasar adalah sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual-beli barang dan jasa. Sedangkan arti pasar adalah suatu tempat dimana pada hari tertentu para penjual dan pembeli dapat bertemu untuk jual-beli barang. Adapun definisi pasar menurut Kuntowijoyo (1994) adalah sebagai mekanisme (bukan hanya sekedar tempat) yang dapat menata kepentingan pihak pembeli terhadap kepentingan pihak penjual.

Pasar Buah Serumpun merupakan salah satu pasar tradisional yang ada dikota Perawang yang terletak dijalan Raya Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Seperti pasar pada umumnya, setiap hari aktivitas antara penjual dan pembeli terus berjalan. Namun adanya aktivitas jual beli antara pedagang dengan pengunjung atau pembeli secara tidak langsung menyebabkan adanya timbunan sampah yang cukup besar di pasar tersebut tiap harinya dan memberikan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat disekitar pasar tersebut. Sampah yang dihasilkan berupa sampah plastik, dan sampah organik yang berasal dari sayuran dan buah-buahan yang telah busuk akibat terlalu lama disimpan. Sayuran dan buah-buahan yang busuk menimbulkan bau yang tidak sedap. Sisa bahan makanan yang tidak sedap dan kebiasaan masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya juga dapat mengurangi nilai estetika pasar. Mengingat sampah memberikan dampak negatif bagi kesehatan dan lingkungan maka sampah harus dikelola dengan baik melalui pengelolaan secara komprehensif dan terpadu agar memberikan manfaat bagi kesehatan masyarakat, aman bagi lingkungan serta dapat mengubah pola masyarakat terhadap kebersihan. Untuk

menangani permasalahan sampah pada Kecamatan Tualang termasuk Pada Pasar Tuah Serumpun Tualang, maka Pemerintah Kabupaten Siak membuat kebijakan berupa Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, sebagai pedoman oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam mengolah sampah di Daerah Kabupaten Siak.

Dimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 tahun 2012 pasal 6 ayat (1) menjelaskan bahwa (!) pengelolaan sampah terdiri atas: a. pengelolaan sampah; dan. b. penanganan sampah. (2). Pengelolaan sampah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Dunia Usaha Dan Masyarakat. (3). Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan demi kelancaran dan keberhasilan pengelolaan sampah di daerah.

Pengelolaan sampah yang dimaksud agar sampah yang dihasilkan tidak membahayakan kesehatan masyarakat dan tidak mencemari lingkungan. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memperoleh manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Sesuai perda Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah. dimana tujuan dari perda ini adalah untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efektif, efisien dan ramah lingkungan, guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Berdasarkan kebijakan tersebut, upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah berdasarkan Perda Kabupaten Siak No 11 Tahun 2012 salah satunya adalah berfokus pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Upaya ini melibatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah, pemilahan sejak dini, serta larangan membuang sampah sembarangan. Selanjutnya penyediaan layanan dan fasilitas pengangkutan sampah yang dilakukan pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak mulai dari pengambilan sampah dan pemindahan sampah dari sumber sampah sampai ketempat penampungan sementara yang kemudian disingkat (TPS) lalu proses pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari tempat penampungan sampah sementara ketempat pemrosesan akhir (TPA) yang terletak di Desa Perawang Barat, Kecamatan Tualang. Sesuai pada isi Perda Kabupaten Siak No 11 Tahun 2012 pasal 18 ayat (1) yang berbunyi bahwa "Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 17 di desa / kelurahan atau nama lainnya kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan,"

Meskipun pasar tidak disebutkan secara khusus didalam perda Kabupaten Siak No 11 Tahun 2012, namun pasar yang termasuk kedalam kategori fasilitas umum dan kawasan komersial sehingga penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di pasar merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah sesuai dengan peraturan daerah.

Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 11 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah pada pasal 11 ayat 1, 2 dan 3 yang berbunyi:

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c dilaksanakan dengan cara:
 - a. Sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh Rt/Rw;
 - b. Sampah dari TPS/TPST ke TPA, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;

- c. Sampah kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS/TPST dan/atau TPA menjadi tanggung jawab pengelola kawasan: dan
 - d. Sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan peangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
 - (3) Alat peangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan dan kebersihan.

Proses pemindahan sampah dilakukan oleh petugas kebersihan pasar dengan menggunakan Truk dan ambrol yang telah disediakan oleh pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup. Pengangkutan sampah di Kecamatan Tualang menggunakan 2 truk dan 1 ambrol. Khusus di pasar buah serumpun tualang, menggunakan 1 truk untuk mengangkut sampah dikarenakan sampah yang dihasilkan sangat banyak dibandingkan dengan tempat lainnya dimana jumlah volume sampah yang dihasilkan dan diangkut dari pasar buah serumpun sekitar 1 hingga 2 ton per hari. Sehingga untuk petugas kebersihan dan petugas pengangkut sampah berjumlah 11 orang yang terdiri dari 5 orang petugas kebersihan dan 6 orang petugas pengangkut sampah dimana proses penganangkutan sampah dari pasar ke TPS dilakukan mulai dari jam 15:00-16:00 Wib. Sampah ini kemudian diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA) Tualang, yang menerima sekitar 1 hingga 2 ton sampah per harinya tergantung pada kepadatan penduduk dengan mayoritas berupa sampah anorganik seperti sampah plastik.

Pengangkutan sampah pada Pasar Buah Serumpun Tualang ke tempat pembuangan akhir (TPA) Tualang dilakukan setiap hari mulai dari jam 07:00-12:00 Wib karena apabila terlambat maka sampah-sampah tersebut akan berserakan karena disebabkan besarnya jumlah volume sampah yang dihasilkan melebihi TPS yang tersedia. Dimana pada Pasar Buah Serumpun hanya tersedia 1 tempat pembuangan sampah (TPS) yang dinilai masih kurang efektif dalam penampungan sampah, dimana hal ini tentunya menghasilkan suatu permasalahan yang harus segera dilakukan penanganan secara serius mengingat sampah yang merupakan hasil buangan yang bersifat rutinitas bagi masyarakat sekitar dan pedagang yang beraktifitas ditempat tersebut yang dapat memberikan dampak negatif seperti, hilangnya estetika lingkungan, pencemaran udara, menimbulkan bau yang tidak sedap dan dampak terhadap kesehatan. Dimana hal tersebut tentunya menimbulkan ketidaknyamanan kepada para pedagang dan pembeli yang berbelanja dan terhadap masyarakat yang melintas. Berikut bukti dokumentasi foto yang diambil oleh peneliti:

Gambar I.1: TPS Pasar Buah Serumpun Tualang



Sumber: Dokumnetasi Penulis, 2024

Gambar I.1 Merupakan fasilitas dan inprastruktur tempat penampungan sampah sementara (TPS) yang tersedia di Pasar Buah Serumpun Kecamatan Tualang yang menjadi sorotan. Dimana pada Pasar Buah Serumpun ini hanya tersedia 1 tempat penampungan sampah sehingga sampah yang dihasilkan pedagang dan masyarakat berserakan dan berceceran dipinggir tempat penampungan, Selain itu kondisi tempat penampungan sampah yang tidak tertutup menyebabkan bau yang tidak sedap sehingga menimbulkan pencemaran udara, mengganggu ketertiban pengguna jalan dan mengurangi nilai estetika pasar.

Oleh karena itu, penting untuk meninjau pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah guna mengevaluasi pencapaian tujuannya serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalannya.

Berdasarkan pra penelitian, permasalahan pengelolaan sampah di Pasar Buah Serumpun Tualang Kabupaten Siak mencakup berbagai aspek sebagai berikut:

1. Koordinasi yang kurang efektif dimana pada Pasar Buah Serumpun Tualang terdapat ketidaksesuaian antara pihak pengelola pasar dan Dinas Lingkungan Hidup dalam hal tanggung jawab pengelolaan sampah, yang menyebabkan penanganan sampah yang kurang optimal sehingga mengakibatkan adanya penumpukan sampah yang tidak terkontrol dilingkungan pasar.
2. Selain itu, infrastruktur dan fasilitas penunjang pengelolaan sampah di Pasar Buah Serumpun Tualang menjadi sorotan dimana tempat pembuangan sampah yang disediakan seringkali tidak mencukupi akibat besarnya volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat dan pedagang pasar sehingga menyebabkan sampah meluber ke area pasar dan sekitar jalan.

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti merasa bahwa pengelolaan sampah pada pasar buah serumpun merupakan hal yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu dirasa perlu untuk dikaji dari segi pelaksanaannya. Peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Pasar Buah Serumpun Tualang Kabupaten Siak."

Studi Kepustakaan**Konsep Administrasi**

Administrasi adalah kerja sama antara dua orang atau lebih yang memiliki komitmen untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan untuk yang sama dan telah ditentukan sebelumnya, Siagian (2008:2), administrasi menurut silalahi adalah kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur mendaya gunakan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (dalam zulkifli,2005;20).

Menurut Sondang P Siagian (dalam Pasolong, 2014:2), administrasi merupakan suatu rangkaian proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Silalahi (2010:8), administrasi secara umum didefinisikan sebagai suatu

bentuk kerjasama. Istilah ini berkaitan dengan aktivitas bersama yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Kerja sama tersebut merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan secara kolektif, terorganisir, dan terfokus, berdasarkan pembagian tugas yang telah disepakati bersama.

Menurut Irra Chisyanti Dewi (2011:3) dalam bukunya yang berjudul Pengantar Administrasi mengatakan “ administrasi dalam arti sempit diartikan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan tulis menulis, tata usaha, atau kesekretarisan”. Kegiatan tersebut mencakup aktivitas seperti menerima, mengirim, menyimpan, mencatat, menghimpun, mengelola, dan mengadakan berbagai dokumen atau informasi.

Menurut Pasolong (2017:3), dalam buku Teori Administrasi Publik mendefinisikan “administrasi sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan. Sedangkan menurut Leonard D White menyatakan administrasi adalah proses yang umum atau upaya kelompok (organisasi) baik itu publik maupun swasta.

Menurut Hadari Nawawi (dalam syafie, 2015) administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Administrasi merujuk pada keseluruhan rangkaian kerja sama antara dua atau lebih individu yang berdasarkan pada suatu tujuan penting yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan memanfaatkan alat dan fasilitas tertentu yang mendukung pada pelaksanaan kegiatan (Sondang P Siagian dalam Zulkifli & Moris 2009:11).

Konsep Organisasi

Menurut Robbins (dalam Budiharjo, 2014:17), organisasi dapat didefinisikan sebagai sekumpulan individu yang secara terarah berkolaborasi dalam batas-batas yang cukup jelas serta bekerja sama pada waktu yang telah ditentukan untuk meraih tujuan tertentu.

Menurut Scott (dalam Budiharjo, 2014:18), sebuah organisasi dianggap sebagai sekumpulan individu yang memiliki tujuan yang sama untuk menjaga keberlangsungan organisasi. Oleh karena itu, mereka berpartisipasi dalam aktivitas kolektif di dalam organisasi dan menciptakan sebuah struktur yang tidak resmi. Sementara itu, Hasibuan (2015:5) menjelaskan bahwa organisasi adalah suatu sistem penggabungan resmi dari dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah sekumpulan individu yang memiliki kepentingan yang sama untuk mencapai tujuan dalam suatu sistem dan berkolaborasi untuk mencapai target tertentu dalam waktu yang telah ditetapkan.

Konsep Manajemen

Manajemen berasal dari istilah yang berarti mengelola. Pengelolaan dilakukan melalui serangkaian langkah dan diatur sesuai dengan urutan dari tugas-tugas manajemen. Dengan demikian, manajemen adalah sebuah proses untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam Hasibuan Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah (2014:1).

Berdasarkan pendapat Kristiawan (2017), manajemen adalah kombinasi ilmu dan seni dalam mengorganisir, mengontrol, berkomunikasi, dan menggunakan semua sumber daya yang ada dalam organisasi dengan memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian, sehingga organisasi dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif.

Mariane dalam karyanya Azas-Azas Manajemen (2018:2) mengungkapkan bahwa

manajemen dapat diartikan sebagai berikut. Manajemen merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh seorang pemimpin atau manajer dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang diperlukan untuk meraih tujuan yang telah ditentukan. Hasibuan, yang dirujuk oleh Mariane dalam bukunya *Azas-Azas Manajemen* (2018:3), menyatakan bahwa "Manajemen adalah kombinasi antara ilmu dan keterampilan dalam mengelola proses penggunaan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain dengan cara yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu".

Dalam memahami dan menjelaskan manajemen, terdapat berbagai cara yang menggambarkannya sebagai pengelolaan, penataan, dan lain-lain. Menurut Manulang (1998) yang diambil dari (buku Zulkifli dan Nurmasari 2015:4), manajemen dapat dilihat dari tiga sudut pandang:

1. Manajemen sebagai sebuah proses.
2. Manajemen sebagai kelompok manusia.
3. Manajemen sebagai suatu bidang ilmu dan juga sebagai seni.

Pemahaman manajemen sebagai suatu proses bisa dilihat dari definisi yang diberikan oleh Haiman (dalam buku Zulkifli dan Nurmasari 2015), yaitu fungsi yang bertujuan untuk mencapai sebuah sasaran dengan melalui kegiatan orang lain, serta mengawasi usaha yang dilakukan oleh individu untuk mencapai tujuan tersebut.

Dari berbagai definis yang telah dikemukakan oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana, yang diharapkan dapat menghasilkan hasil yang sesuai dengan tujuan dari suatu kebijakan. Van Meter dan Van Horn (dalam Anggara 2014:232) menyatakan bahwa implementasi mencakup serangkaian tindakan yang diambil oleh individu atau pejabat serta kelompok, baik dari pemerintah maupun swasta, yang bertujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan dalam kebijakan.

Menurut Winarno (2016:134), implementasi kebijakan merupakan tahapan yang terjadi setelah suatu kebijakan ditetapkan melalui undang-undang. Tahapan ini dipahami sebagai sebuah rangkaian proses atau keputusan-keputusan yang diambil yang bertujuan untuk memastikan agar kebijakan yang telah disahkan oleh lembaga legislatif dapat dilaksanakan secara nyata.

Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah cara agar suatu kebijakan dapat tercapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakn publik, ada dua cara yang bisa dilakukan yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut (Nugroho, 2003:158).

Menurut Mazmanian dan Sabatier sebagaimana dikutip oleh Agustino (2008:139), menyatakan bahwa imlementasi kebijakan adalah pelaksanaan dari keputusan dasar pemerintah, yang bisa berbentuk undang-undang, keputusan eksekutif, atau putusan pengadilan. Biasanya, keputusan ini memuat permasalahan utama yang ingin diselesaikan, tujuan yang hendak dicapai, serta cara-cara atau strategi untuk menjalankan kebijakan tersebut secara terstruktur. Maksud dari implementasi tersebut menegaskan bahwa sebuah kebijakan tidak cukup hanya dirumuskan dan disahkan dalam bentuk peraturan, tetapi juga

harus dijalankan agar dapat memberikan dampak nyata dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Konsep Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah area layanan publik di mana pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas dan sarana dalam pengelolaan limbah. Dalam praktiknya, ini dapat melibatkan pihak ketiga serta partisipasi dari masyarakat. Diharapkan bahwa pengelolaan limbah dapat mengurangi masalah-masalah yang diakibatkan oleh limbah terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta menjadikan limbah sebagai suatu sumber daya. Di tingkat nasional, pengelolaan limbah telah diatur dalam UU No. 18 Tahun 2008 tentang "Pengelolaan Limbah", di mana pasal 2 ayat 1 menjelaskan jenis limbah yang dikelola adalah:

1. Sampah Rumah Tangga.
2. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
3. Sampah Spesifik

Kemudian dijelaskan bahwa pengelolaan sampah tahunan bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat serta memperbaiki kualitas lingkungan dan juga mengubah sampah menjadi sumber pendapatan. Secara umum, isi undang-undang tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah yang baik dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.

Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UUPS), sampah didefinisikan sebagai sisa dari aktivitas sehari-hari manusia atau proses alam yang berwujud padat. Sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia perlu diolah agar tidak menyebabkan pencemaran lingkungan dan masalah kesehatan. Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang dilakukan secara teratur, menyeluruh, dan berkelanjutan, mencakup pengurangan serta pengelolaan sampah. Pengurangan sampah yang dimaksud dalam UUPS mencakup pembatasan jumlah sampah yang dihasilkan, mendaur ulang sampah, dan memanfaatkan kembali sampah.

Secara umum, pengelolaan sampah di daerah perkotaan dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir. Menggambarkan secara sederhana langkah-langkah dalam proses pengelolaan sampah sebagai berikut:

1. Pengumpulan, yang diartikan sebagai pengelolaan limbah dari lokasi asal hingga tempat penampungan sementara sebelum melanjutkan ke tahap selanjutnya. Pada tahap ini, digunakan alat bantu seperti tempat sampah, bak sampah, kontainer sampah, gerobak, atau lokasi untuk penampungan sementara. Biasanya, dalam pengumpulan melibatkan sejumlah petugas yang mengambil sampah pada waktu-waktu tertentu.
2. Pengangkutan, yaitu memindahkan sampah dengan menggunakan alat transportasi yang sesuai ke lokasi pembuangan akhir atau tempat pengolahan. Di tahap ini juga melibatkan tenaga yang secara berkala mengangkut limbah dari lokasi penampungan sementara ke tempat pembuangan akhir.
3. Pembuangan akhir, di mana limbah akan menjalani proses pengolahan baik melalui cara fisik, kimia, maupun biologis sampai seluruh proses selesai.

Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa prinsip 3R:

1. Prinsip awal adalah mengurangi atau reduksi limbah, yang berarti usaha untuk menekan jumlah sampah di sumbernya dan bahkan dapat dilakukan sebelum sampah itu muncul. Setiap sumber dapat berperan dalam mengurangi limbah dengan mengubah cara konsumsi, yaitu merubah kebiasaan dari yang boros dan menghasilkan banyak sampah menjadi lebih hemat efisien dan memproduksi sedikit limbah.
2. Prinsip kedua adalah penggunaan kembali atau reuse, yang mengacu pada pemanfaatan kembali bahan atau material agar tidak menjadi limbah tanpa melalui proses pengelolaan.
3. Prinsip ketiga adalah daur ulang atau recycle, yang berarti mengolah bahan yang sudah tidak berguna menjadi barang baru setelah menjalani proses tertentu. Masyarakat dapat mendaur ulang berbagai jenis limbah dengan memanfaatkan teknologi dan alat sederhana, seperti mengolah sisa kain menjadi selimut, kain lap, keset kaki, atau mendaur ulang sisa-sisa makanan menjadi kompos.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah adalah suatu kegiatan bertahap yang pada dasarnya bertujuan untuk mengolah sampah agar dapat diubah menjadi bentuk lain yang bermanfaat dan tidak merugikan lingkungan.

Hasil Dan Pembahasan

Implementasi merupakan salah satu tahapan penting dalam proses kebijakan publik yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan yang telah dirumuskan. Kebijakan akan memberikan hasil nyata apabila telah diimplementasikan secara menyeluruh sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Pasar Buah Serumpun Tualang Kabupaten Siak, peneliti melakukan wawancara dan observasi lapangan guna memperoleh data yang relevan.

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Pasar Buah Serumpun mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah yang mengatur mengenai kewenangan pemerintah daerah, peran masyarakat dan pedagang pasar, serta teknis pelaksanaan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. Namun dalam pelaksanaannya, masih ditemukan berbagai permasalahan di lapangan, seperti penumpukan sampah yang tidak terkontrol di area sekitar Tempat Penampungan Sementara (TPS), minimnya kesadaran pedagang dan pengunjung pasar dalam membuang sampah pada tempatnya, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung.

Untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan tersebut, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III yang meliputi empat indikator, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Berikut hasil pembahasannya:

1. Komunikasi

Menurut Winarno (2016:180), komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Dalam konteks kebijakan publik, Edward menyatakan bahwa informasi mengenai suatu kebijakan harus disampaikan dengan jelas kepada para pelaksana kebijakan. Hal ini penting agar para pelaksana memahami apa saja yang perlu

dipersiapkan dan dilakukan dalam menjalankan kebijakan, sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan proses sosialisasi, kejelasan informasi, serta konsistensi dalam penyampaian isi kebijakan kepada seluruh pihak yang terkait.

Komunikasi menjadi salah satu dimensi yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan dalam suatu unit kerja. Dalam konteks implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Pasar Buah Serumpun Tualang, komunikasi berperan sebagai jembatan antara pembuat kebijakan dan pelaksana di lapangan. Proses komunikasi ini mencakup penyampaian informasi yang berisi pesan penting dari pihak pengambil kebijakan kepada para pemangku kepentingan (stakeholder) seperti petugas UPT Pasar, pedagang, dan masyarakat sekitar.

Kejelasan isi informasi serta konsistensi dalam penyampaian kebijakan menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak memahami arah dan tujuan kebijakan tersebut. Berdasarkan temuan di lapangan, masih terdapat beberapa kendala dalam hal komunikasi, seperti kurangnya sosialisasi secara langsung kepada pedagang dan masyarakat, serta belum meratanya pemahaman tentang isi kebijakan pengelolaan sampah di lingkungan pasar.

Dalam mengukur efektivitas komunikasi dalam implementasi kebijakan, Edward mengemukakan tiga indikator utama, yaitu: (1) transmisi informasi atau proses sosialisasi kebijakan kepada pihak terkait, (2) kejelasan isi pesan kebijakan yang disampaikan, dan (3) konsistensi informasi yang diterima oleh para pelaksana.

A. Transmisi

Transmisi atau sosialisasi merupakan tahap awal yang krusial dalam proses komunikasi kebijakan publik. Pada tahap ini, penyampaian informasi kebijakan tidak hanya ditujukan kepada pelaksana (implementor) kebijakan saja, melainkan juga harus mencakup kelompok sasaran dan pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan yang diimplementasikan. Sosialisasi yang efektif akan menentukan sejauh mana pihak-pihak terkait memahami, menerima, dan mendukung implementasi kebijakan.

Dalam pelaksanaannya, proses transmisi komunikasi kebijakan tidak lepas dari berbagai hambatan. Salah satu hambatan umum yang sering dijumpai adalah adanya ketidaksesuaian atau konflik antara pelaksana kebijakan dengan keputusan atau instruksi yang diberikan oleh pembuat kebijakan. Ketidakharmonisan ini dapat menyebabkan gangguan komunikasi yang berujung pada pelaksanaan kebijakan yang tidak optimal. Selain itu, transmisi informasi yang melalui banyak jenjang birokrasi juga menjadi persoalan tersendiri. Rantai komunikasi yang terlalu panjang berisiko menimbulkan distorsi informasi, di mana pesan awal yang disampaikan tidak sampai secara utuh kepada penerima terakhir. Hal ini dapat mengakibatkan perbedaan penafsiran terhadap kebijakan yang disampaikan.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dapat disimpulkan bahwa informasi yang disampaikan dalam proses sosialisasi masih bersifat umum dan belum menyentuh aspek-aspek teknis implementasi kebijakan, seperti prosedur pengangkutan, penempatan, dan pengelolaan sampah di lapangan. Ketidaktepatan ini kemudian berdampak pada pelaksanaan kebijakan yang kurang optimal di tingkat operasional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dimensi transmisi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Pasar Buah Serumpun belum berjalan secara efektif.

Sosialisasi yang dilakukan belum menjangkau seluruh stakeholder secara komprehensif dan tidak dilaksanakan secara rutin, serta belum memberikan kejelasan teknis yang dibutuhkan oleh pelaksana kebijakan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi kebijakan yang lebih intensif, mendalam, dan berkelanjutan agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.

B. Kejelasan

Agar kebijakan dapat dipahami secara jelas oleh para pelaksana, kelompok sasaran, serta pihak-pihak terkait lainnya, maka diperlukan proses transmisi yang efektif. Hal ini penting agar seluruh pihak memahami maksud, tujuan, sasaran, dan substansi dari kebijakan publik yang disampaikan. Dengan demikian, masing-masing pihak akan memiliki gambaran yang jelas mengenai hal-hal yang perlu dipersiapkan dan langkah-langkah yang harus dilakukan guna mendukung keberhasilan implementasi kebijakan secara efektif dan efisien.

Penyebarluasan informasi mengenai isi atau substansi dari suatu kebijakan merupakan bagian penting dalam menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan. Kejelasan informasi yang disampaikan selama proses sosialisasi sangat berpengaruh terhadap tingkat pemahaman dan pengetahuan para pihak yang akan terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, isi kebijakan perlu disampaikan secara jelas, terperinci, dan mudah dipahami agar dapat mendukung keberhasilan implementasinya.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa aspek kejelasan dalam implementasi Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah masih belum berjalan secara optimal. Meskipun isi kebijakan telah disampaikan, bahasa yang digunakan dalam sosialisasi dinilai terlalu teknis dan formal, sehingga menyulitkan sebagian pelaksana di lapangan untuk memahami isi perda secara utuh. Pihak UPT mengungkapkan bahwa istilah-istilah dalam perda sering kali tidak familiar, dan penjelasan teknis tambahan sangat dibutuhkan untuk menghindari kesalahan tafsir. Selain itu, belum tersedia pedoman teknis atau contoh konkret sebagai acuan dalam pelaksanaan di lapangan.

C. Konsistensi

Konsistensi dalam kebijakan sangat penting agar pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak-pihak yang terkait tidak mengalami kebingungan akibat kebijakan yang berubah-ubah. Konsistensi ini berkaitan langsung dengan kelompok sasaran atau target group, yaitu pihak yang menjadi objek utama dari pelaksanaan kebijakan. Keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada kelompok sasaran ini, karena pada dasarnya kebijakan dibuat untuk menjawab persoalan atau kebutuhan yang ada dalam kelompok tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam aspek konsistensi, implementasi Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2012 di Pasar Buah Serumpun masih menghadapi tantangan dalam aspek konsistensi. Meskipun petunjuk dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) secara umum telah disampaikan dengan cukup jelas khususnya terkait pengangkutan dan penempatan kontainer sampah namun kenyataannya di lapangan belum sepenuhnya selaras dengan arahan tersebut.

Beberapa kendala seperti keterbatasan armada, gangguan teknis, serta kondisi pasar yang dinamis menyebabkan pelaksanaan kebijakan tidak selalu sesuai dengan rencana. Selain itu, kurangnya sosialisasi secara rutin dan menyeluruh turut berkontribusi terhadap perbedaan pemahaman antar pihak pelaksana. Setiap instansi atau pelaksana di lapangan cenderung menafsirkan kebijakan dengan caranya masing-masing, yang kemudian menghambat koordinasi dan penerapan kebijakan secara seragam. Dengan demikian, untuk

mewujudkan pelaksanaan perda yang lebih konsisten dan efektif, diperlukan peningkatan dalam hal koordinasi antar lembaga, penyesuaian kebijakan dengan kondisi riil di lapangan, serta intensifikasi kegiatan sosialisasi kepada seluruh pihak yang terlibat.

2. Sumber Daya

Menurut Winarno (2016:180), sumber daya merupakan elemen penting dalam proses implementasi kebijakan yang harus dikelola dengan hati-hati, jelas, dan konsisten. Pengelolaan yang baik diharapkan mampu membuat pelaksanaan kebijakan menjadi lebih efektif. Oleh karena itu, dukungan dari berbagai sumber sangat diperlukan, seperti sumber daya manusia (SDM), anggaran, serta ketersediaan sarana dan prasarana sebagai fasilitas penunjang di lapangan.

Sumber daya dalam organisasi dipandang sebagai bagian dari input yang memiliki dampak secara ekonomi dan teknologi. Dari sisi ekonomi, sumber daya berkaitan dengan biaya atau pengorbanan yang dikeluarkan organisasi, yang mencerminkan nilai atau manfaat potensial saat diolah menjadi output. Sementara dari aspek teknologi, sumber daya berhubungan dengan sejauh mana kemampuan organisasi dalam mengolah input tersebut menjadi hasil atau keluaran yang diinginkan (Tachjan, 2006:135).

A. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia memegang peran penting dalam keberhasilan pelaksanaan sebuah kebijakan. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan sumber daya manusia adalah para pelaksana kebijakan di lapangan, seperti petugas, staf teknis, maupun aparatur yang terlibat secara langsung dalam implementasi. Agar kebijakan dapat berjalan secara efektif, jumlah pelaksana yang tersedia harus mencukupi untuk menangani beban kerja yang ada. Tidak hanya itu, para pelaksana tersebut juga perlu memiliki kualifikasi yang sesuai, baik dari segi pengetahuan, keahlian teknis, maupun keterampilan yang relevan dengan tugas yang dijalankan. Berdasarkan hasil penelitian dengan Kepala Korwil III Kecamatan Tualang, dapat diketahui bahwa jumlah sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah masih belum mencukupi. Terutama pada bagian petugas kebersihan, tenaga kerja yang ada belum sebanding dengan luasnya area pasar dan tingginya aktivitas harian yang terjadi. Kondisi ini mengakibatkan pelaksanaan tugas-tugas lapangan, seperti proses pembersihan sampah pasar dan pengangkutan sampah dari dalam pasar ke TPS, belum bisa dilakukan secara maksimal. Keterbatasan jumlah petugas juga membuat penanganan sampah menjadi lambat dan tidak menjangkau seluruh wilayah pasar secara menyeluruh.

B. Sumber daya anggaran

Keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor yang dapat menghambat keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Selain membuat program tidak dapat dijalankan secara maksimal, minimnya anggaran juga berdampak pada menurunnya semangat dan komitmen para pelaksana kebijakan di lapangan.

Menurut Sulila (2015:52), anggaran berperan sebagai alat perencanaan manajerial dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Dalam konteks sektor publik, anggaran disusun untuk merancang tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah, memperkirakan besarnya biaya yang diperlukan, serta menghitung hasil atau manfaat yang diharapkan dari pengeluaran tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan anggaran untuk

kebersihan di Pasar Buah Serumpun masih belum berjalan secara terpadu antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan UPT Pasar. Meskipun DLH memiliki anggaran rutin untuk pengelolaan sampah, dana tersebut belum secara khusus difokuskan untuk kebutuhan pasar tradisional. Bantuan yang diberikan biasanya berupa fasilitas dasar seperti armada pengangkut dan tempat sampah, namun jumlahnya masih terbatas.

Di sisi lain, UPT Pasar lebih banyak mengandalkan dana dari retribusi pasar untuk membiayai kebutuhan operasional harian, seperti honor petugas kebersihan dan perlengkapan kerja. Keterbatasan anggaran dari kedua belah pihak, ditambah dengan luasnya wilayah kerja, menjadi kendala dalam menciptakan pengelolaan sampah yang maksimal di area pasar. Oleh karena itu, perlu ada sinergi dan perencanaan anggaran yang lebih jelas antara DLH dan UPT pengelola pasar agar pengelolaan sampah di pasar bisa lebih efektif dan merata.

C. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana merupakan seluruh fasilitas yang disediakan guna menunjang pelaksanaan suatu kebijakan, di mana keberadaannya berfungsi secara langsung dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditetapkan. Menurut Sulila (2015:53), pengembangan sarana dan prasarana memegang peranan penting dalam menunjang berbagai aktivitas, baik ekonomi, sosial, maupun budaya, serta memperkuat integrasi dan kesatuan bangsa. Infrastruktur ini berfungsi sebagai fondasi utama dalam mendukung interaksi dan komunikasi antar kelompok masyarakat serta menjalin keterhubungan antarwilayah. Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, pembangunan sarana dan prasarana diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing nasional.

Berdasarkan penelitian dengan Kepala Korwil III Kecamatan Tualang dan petugas kebersihan, dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana untuk mendukung pengelolaan sampah di pasar masih belum mencukupi. Meski Dinas Lingkungan Hidup (DLH) telah menyediakan dua unit kontainer amrol dan menugaskan beberapa petugas, namun kenyataannya di lapangan sering kali hanya satu kontainer yang benar-benar bisa digunakan, padahal volume sampah yang dihasilkan cukup tinggi karena aktivitas pasar berlangsung selama 24 jam. Dari sisi petugas, mereka juga mengungkapkan bahwa peralatan kerja seperti sapu, gerobak dorong, serta perlengkapan keselamatan kerja (APD) masih terbatas. Banyak di antara mereka yang harus menggunakan alat yang sudah usang atau bahkan membeli perlengkapan sendiri karena tidak mendapatkan distribusi APD secara rutin. Tempat sampah juga belum tersebar secara merata, sehingga banyak sampah yang dibuang sembarangan dan cepat menumpuk. Secara umum, kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pengelolaan sampah di Pasar Buah Serumpun masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari segi ketersediaan fasilitas, keterbatasan perlengkapan, hingga kurangnya dukungan bagi petugas di lapangan. Akibatnya, proses pengelolaan sampah belum berjalan maksimal dan masih perlu ditingkatkan ke depannya.

3. Disposisi

Menurut Winarno (2016:183), disposisi atau sikap dari para pelaksana merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik. Agar kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif, pelaksana perlu memiliki kemauan dan sikap positif dalam menjalankan tugasnya. Disposisi ini mencerminkan karakter serta sifat dasar dari pelaksana

kebijakan. Ketika seorang implementor memiliki sikap yang baik, maka kebijakan cenderung akan dijalankan sesuai dengan harapan dari pihak pembuat kebijakan. Sikap tersebut meliputi aspek komitmen, kejujuran, dan sikap demokratis.

Sebaliknya, jika pelaksana tidak memiliki disposisi yang mendukung, maka hal ini dapat menjadi hambatan nyata dalam proses implementasi. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa individu yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan adalah orang-orang yang memiliki dedikasi tinggi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, khususnya dalam hal pelayanan terhadap kepentingan masyarakat.

A. Komitmen pelaksana

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, setiap aparatur dituntut memiliki komitmen serta kesadaran yang tinggi dalam menginternalisasi nilai-nilai mutu pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Wujud dari komitmen tersebut tercermin dalam karakter pelaksana kebijakan yang mencakup kejujuran, tanggung jawab, ketelitian, kedisiplinan, serta kemampuan bekerja secara efektif dan efisien. Selain itu, aparatur juga diharapkan memiliki sikap inovatif, mampu memberikan pelayanan dengan penuh penghormatan, bersikap sopan, ramah, adil tanpa diskriminasi, bekerja secara profesional tanpa tekanan, serta menjunjung tinggi integritas, guna mendukung keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

Jika dilihat dari hasil wawancara yang diperoleh dari hasil narasumber dan observasi yang peneliti lakukan bisa disimpulkan bahwa sebenarnya komitmen untuk menjalankan pengelolaan sampah itu sudah ada. Pihak pengelola pasar terlihat berusaha menjalankan tugasnya sesuai Perda No. 11 Tahun 2012, seperti dengan menjadwalkan pengangkutan sampah, menempatkan petugas kebersihan di beberapa titik, dan mengingatkan pedagang untuk buang sampah di tempat yang benar.

Tapi, di sisi lain, masih ada tantangan yang dirasakan. Jumlah petugas kebersihan yang terbatas membuat para petugas kebersihan pasar kewalahan, apalagi saat hari pasar besar di mana sampah menumpuk lebih banyak. Beberapa pengunjung juga mengaku kalau petugas sebenarnya sudah rajin, cuma karena orangnya sedikit, jadi belum semua area bisa bersih maksimal. Dari situ bisa dilihat, walaupun niat dan komitmennya sudah ada, tapi pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Butuh dukungan tambahan seperti penambahan tenaga kebersihan, fasilitas yang memadai, dan sosialisasi yang lebih rutin supaya semua pihak benar-benar paham dan bisa kerja bareng dalam menjaga kebersihan pasar.

B. Kejujuran

Pelaksana kebijakan memiliki tanggung jawab untuk menerima, menanggapi, dan menghargai berbagai bentuk aspirasi, keluhan, maupun pengaduan dari masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyediakan mekanisme penyampaian aspirasi yang jelas dan terbuka agar masyarakat memahami prosedur yang harus mereka lalui. Dengan adanya kejelasan tersebut, diharapkan masyarakat dapat memperoleh respon atau tindakan nyata dari pemerintah dalam waktu yang terukur. Salah satu bentuk pendekatan yang bisa dilakukan adalah dengan membuka ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai titik temu, atau menyediakan saluran komunikasi dua arah yang dibangun atas dasar keterbukaan dan kejujuran guna menumbuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti

terhadap Kepala Korwil III Kecamatan Tualang serta pedagang pasar, dapat disimpulkan bahwa sub indikator kejujuran pelaksana kebijakan, khususnya petugas kebersihan, dinilai sudah cukup baik. Kepala Pengelolaan Pasar Kecamatan Tualang menyatakan bahwa para petugas kebersihan memiliki sikap tanggung jawab dan bisa dipercaya. Mereka melaksanakan tugas tanpa pilih-pilih area kerja dan tetap bekerja meskipun dalam kondisi pasar yang ramai atau tidak ideal. Hal ini menunjukkan adanya komitmen serta kejujuran dalam menjalankan tugas di lapangan.

Senada dengan itu, hasil wawancara dengan pedagang juga menunjukkan persepsi yang positif. Para petugas dinilai rajin, bekerja dari pagi hari tanpa tebang pilih, dan tidak pernah terdengar melakukan tindakan yang merugikan, seperti menyalahgunakan barang dagangan pedagang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan dalam aspek kejujuran sudah berjalan dengan cukup baik. Petugas kebersihan dinilai memiliki integritas dan tanggung jawab dalam menjalankan peran mereka, meskipun masih terdapat kendala di lapangan seperti keterbatasan jumlah personel atau sarana pendukung.

4. Struktur Birokrasi

Menurut Winarno (2016:188), struktur birokrasi adalah tatanan unit kerja dalam sebuah organisasi yang mencerminkan pembagian tugas yang jelas, termasuk pemisahan fungsi atau aktivitas yang beragam. Struktur ini dirancang agar setiap bagian saling terintegrasi, terkoordinasi, serta memiliki spesifikasi tugas yang jelas, alur komando yang tertata, dan sistem pelaporan yang terstruktur. Struktur birokrasi yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses implementasi kebijakan tersebut. Adapun hal ini meliputi: 1) Adanya standar operasional prosedur, dan 2) Fragmentasi.

A. Adanya Sop

Berdasarkan hasil penelitian wawancara dan observasi dengan Staf Pengawas Lingkungan Hidup dan Kepala Korwil III Kecamatan Tualang, dapat disimpulkan bahwa penerapan standar operasional prosedur (SOP) dalam pengelolaan sampah di kawasan pasar masih belum berjalan secara maksimal. Meskipun Dinas Lingkungan Hidup telah menyusun SOP sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012, pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman tersebut dan masih perlu penyesuaian teknis yang menyesuaikan dengan kondisi pasar. Sementara itu, pihak pengelolaan pasar Kecamatan Tualang belum memiliki dokumen SOP yang secara rinci mengatur pengelolaan sampah pasar. Aktivitas pengelolaan lebih banyak dijalankan berdasarkan kebiasaan yang berkembang di lapangan serta pengalaman petugas. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah pada pasar masih dibutuhkan perbaikan dalam hal koordinasi antara UPT pasar dan DLH, serta pentingnya penyusunan SOP yang lebih spesifik agar pengelolaan sampah dapat dilakukan secara lebih terarah, konsisten, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

B. fragmentasi

Fragmentasi dan keterlibatan lebih banyak pelaku dalam pelayanan publik membutuhkan komitmen mutu yang jelas dan tegas berdasarkan tingkat kewenangan yang diberikan. Komitmen mutu terdiri dari tiga tingkat, yaitu pada tingkat organisasi yang menetapkan prinsip dan janji pemerintah untuk kualitas yang memenuhi permintaan konsumen dan mendukung partisipasi publik (berdasarkan kualitas pelanggan).

Berdasarkan hasil observasi yang diperoleh dari wawancara dengan Staf Pengawas Lingkungan Hidup dan Kepala Korwil III Kecamatan Tualang, diketahui bahwa koordinasi antara pihak pasar dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam pengelolaan sampah masih menghadapi sejumlah hambatan. Meskipun telah adanya kerja sama, implementasinya di lapangan belum bisa dilaksanakan secara maksimal karena belum adanya kejelasan yang tegas mengenai pembagian peran dan tanggung jawab antara DLH dan pihak Korwil III Kecamatan Tualang. Informasi dari narasumber juga menunjukkan bahwa komunikasi memang terjalin, namun sering kali tidak disertai dengan tindakan langsung di lapangan. Hal tersebut terjadinya karena adanya ketidakpastian mengenai siapa yang sepenuhnya bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah sehingga hal tersebut menjadi sebuah persoalan yang belum terselesaikan. Di samping itu, keterbatasan tenaga kerja, sarana, dan prasarana turut menjadi tantangan tersendiri dalam menjalankan pengelolaan sampah secara efektif. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi antarinstansi terkait masih perlu ditingkatkan, baik dari segi komunikasi, pembagian tugas yang lebih jelas, maupun penyediaan sumber daya yang memadai, agar proses pengelolaan sampah di pasar dapat berjalan dengan lebih baik, terarah, dan berkelanjutan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penyusunan SOP Teknis Khusus

Pemerintah daerah bersama instansi terkait perlu segera menyusun dan menetapkan SOP teknis yang sesuai dengan kondisi pasar tradisional, agar proses pengelolaan sampah dapat dilakukan secara terarah dan konsisten oleh seluruh pihak pelaksana

2. Peningkatan Koordinasi Antarinstansi

Koordinasi yang kuat antara Korwil III Kecamatan Tualang sebagai pengelola pasar dan DLH sebagai instansi teknis yang menangani persampahan sangat penting untuk menjamin kelancaran implementasi kebijakan. Saat ini, lemahnya koordinasi antarinstansi menyebabkan seringnya terjadi miskomunikasi dan tumpang tindih kewenangan. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme koordinasi yang lebih rutin dan sistematis, seperti rapat koordinasi bulanan, penggunaan platform komunikasi digital antarinstansi, serta pembentukan tim kecil lintas sektor yang bertugas menangani masalah sampah secara cepat. Dengan memperkuat komunikasi dan sinergi ini, hambatan-hambatan teknis dan administratif yang selama ini terjadi bisa diminimalisasi, dan kebijakan yang sudah dibuat dapat berjalan secara sinkron di lapangan.

3. Penambahan Tenaga Kebersihan dan Fasilitas

Kondisi jumlah petugas kebersihan yang tidak sebanding dengan volume sampah yang dihasilkan menjadi salah satu penyebab utama tidak optimalnya pengelolaan sampah di Pasar Buah Serumpun. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan rekrutmen atau penempatan ulang tenaga kerja kebersihan agar jumlahnya sesuai dengan beban kerja di lapangan. Di samping itu, perlu dilakukan pengadaan dan perbaikan sarana pendukung seperti tempat sampah yang memadai di tiap titik strategis pasar, pembangunan TPS (Tempat Penampungan Sementara) yang tertutup dan sesuai standar, serta penambahan armada pengangkut sampah yang memiliki jadwal pengangkutan tetap.

Dengan terpenuhinya kebutuhan ini, proses pengelolaan sampah akan berjalan lebih lancar dan efisien, serta mengurangi potensi timbulnya tumpukan sampah yang mengganggu aktivitas pasar.

4. Peningkatan Anggaran

Aspek pendanaan merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala utama, khususnya dalam hal operasional, penyediaan fasilitas, dan pelatihan sumber daya manusia. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran yang lebih proporsional dan berkelanjutan untuk program pengelolaan sampah di pasar. Anggaran ini dapat dimanfaatkan untuk membiayai berbagai kegiatan penting seperti pemeliharaan alat dan sarana kebersihan, pelatihan petugas, kampanye penyuluhan kepada masyarakat, serta insentif bagi petugas lapangan yang berprestasi. Jika anggaran tersedia dengan cukup dan dikelola secara transparan, maka pelaksanaan kebijakan tidak hanya akan berjalan lebih baik, tetapi juga dapat dievaluasi secara terukur.

5. Edukasi dan Pengawasan kepada Masyarakat

Keterlibatan masyarakat, khususnya pedagang dan pengunjung pasar, merupakan elemen penting dalam menciptakan lingkungan pasar yang bersih dan sehat. Tanpa kesadaran kolektif dari seluruh pengguna pasar, sebaik apapun sistem pengelolaan yang dibuat, tetap akan sulit mencapai hasil yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan program edukasi yang berkelanjutan dengan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat pasar. Edukasi ini bisa dilakukan melalui spanduk, brosur, pengumuman rutin, hingga kegiatan sosialisasi langsung seperti penyuluhan atau simulasi praktik membuang sampah yang benar. Di samping itu, pengawasan yang ketat dari petugas juga penting untuk mendorong kedisiplinan, misalnya dengan adanya sanksi administratif atau peringatan bagi pelanggar. Upaya ini diharapkan dapat membentuk kebiasaan baru yang lebih bertanggung jawab, sehingga ke depan, pengelolaan sampah dapat berjalan dengan melibatkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta
- Arifin, Setiadi, dan Setiawan (2013). *Manajemen Pemerintahan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Bungin, Burhan. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rajawali Pers
- Dewi, Irra Chrisyanti. 2011. *Pengantar Ilmu Administrasi*, Jakarta: PT.Prestasi Pustakarya.
- Keban, Yermias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori Dan Isu*. Yogyakarta : Gava Media
- Moleong, J. Lexy. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Mulyadi. 2016. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salameba Empat
- Mustanir, Ahmad, etal. 2023. "Teori Administrasi Publik." Padang: Global Eksekutif Teknologi (GetPress)

- Nawawi, Hadari. 2012. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Nurman, 2023. *Teori Admnistrasi: Adminstrasi executive*. Yogyakarta: Deepublish
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta
- Pasolong, Harbani. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta
- Silalahi, Ulbert. 2013. *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung : Sinar Baru Algesindo
- Sulila, Ismet. (2015). *Implementasi Dimensia Layanan Publika Dalama Konteksa Otonomia Daerah Edisia 2.a Yogyakarta:a Cva Budia Utama*.
- Syafri, H. Wirman. 2012. *Studi Tentang Admnistarsi Public*. Jakarta : Erlangga

Jurnal:

- Anggraini, D. (2023). Pengaruh Beban Kerja, Disiplin Kerja Dan Motivasi Intrinsik Terhadap Kinerja Karyawan Pada Ud. Sapu Jagad Ponorogo (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo)
- Gafar, M. (2021). Efektivitas Kerja Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Di Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kabupaten Tolitoli. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(7), 1951-1958
- Maharani, B. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kota Duri Kabupaten Bengkalis (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau)
- NIM, A. (2017). Implementasi Peraturan Bupati No. 31 Tahun 2014 Tentang Penanganan Dan Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Sungai Raya. *Publika Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal)*, 6(2)
- Nurhapani, N. (2020). Perkembangan Ilmu Administrasi Dan Fungsinya Untuk Mendukung Perkembangan Ilmu Administrasi. *Ensiklopedia Sosial Review*, 2(1), 9-13
- PERTIWI, Y. G. (2018). Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Pada Kawasan Alun-Alun Dan Masjid Raya Kota Bandung (Doctoral dissertation, PERPUSTAKAAN)
- Primayana, K. H. (2015). Manajemen sumber daya manusia dalam peningkatan mutu pendidikan di Perguruan Tinggi. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 1(02), 7-15
- SYARAH, E. (2018). Implementasi Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Muara Jalai Kec. Kampar Utara Kab. Kampar (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)
- Tampubolon, J. L., & Rostyaningsih, D. (2018). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 7(2), 533-543
- Utami, F. S. (2022). Manajemen Pengelolaan Sampah Di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan)
- Umi, K., Susilowati, A., Utama, M. I. P., & Eva, S. (2023). Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (Kip Kuliah) Di Universitas Baturaja (Doctoral dissertation, Universitas Baturaja)
- Witarsa, R. (2019). Implementasi Kebijakan Program Kebersihan Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang (Studi Kasus di Kecamatan Pusakanagara (Doctoral dissertation, FISIP UNPAS)
- Zulaeha, S. (2020). Efektivitas Pelayanan E-Samsat Bagi Masyarakat Membayar Pajak

- Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Bandung. *Universitas Komputer Indonesia*
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. alfabeta: Bandung
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung:Alfabeta
- Winarno, Budi. (2016). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Zulkifli. 2013. *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Usulan Penelitian Dan Kertas Kerja Mahasiswa*. Pekanbaru: Badan Penerbit Fisipol UIR
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 152-155). Atlantis Press.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lantas Polresta Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 137-155.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.
- Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 49-58.
- Handrian, E. (2024). E-govqual Aplikasi PEKA (Pekan Kita) Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 74-89.
- Handrian, E. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Riau (Studi Tujuan Pertama: Kemiskinan) Di Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 708-729.
- Handrian, E., & Putriani, S. (2021). Reformasi Administrasi Pelayanan Publik di Kantor Camat Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(2), 143-154.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Khan, M. C. (2021). Model Inkremental: Evaluasi Program Peningkatan Kesempatan Kerja di Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(1), 1-12.
- Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.

- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.
- Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.
- Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah. Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.
- Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 41-54.
- Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.
- Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 17-35.
- Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1458-1463.
- Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).
- Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.
- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-10.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu*, 1340

- Teori, Konsep Dan Aplikasi.
- Hamim, S. (2005). Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan. Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian.
- Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). Perilaku dan Etika Administrasi Publik. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 6(1), 77-87.
- Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 3(1), 66-79.
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota pekanbaru. Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 12(02), 194-205.
- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP), 12(1), 18-28.
- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Stretegi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau, 1-83.
- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 3(2), 248-261.
- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 2(2), 197-215.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. PERSPEKTIF, 13(1), 164-173.
- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. Masyarakat Berdaya dan Inovasi, 4(2), 242-248.
- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 5(2), 1180-1192.
- Nurmasari, N., Komalasari, E., Muliando, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024). PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI MANDIRI. Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3(1), 35-40.
- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 3(1), 122-134.
- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana

- Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 22-29.
- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In ICSScE 2018.
- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81-90.
- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2).
- Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 39-53.
- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3 (2), 163–175.
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Masyarakat Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90-102.
- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 89-101.
- Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.
- Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24-42.
- Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(03), 247-256.
- Al Hafis, R. I., & Yogya, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.
- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Wacana*, 16(4), 171-178.
- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis–Selat Malaka. *Gema Publica*, 3(2), 111-119.
- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and*

- Entrepreneurship: Trends of Development, 3(17), 55-67.
- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 521-529.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 120-125.
- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran*.
- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)* (pp. 310-318). Atlantis Press.
- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). *VALUTA*, 2(1), 130-139.
- Zubaidah, E., Monalisa, M., Rusadi, S., & Handoko, T. (2024). E-Readiness Analysis to Accelerate Transformation Towards E-Government in Regional Government in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 16(1), 37-53.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).
- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 32-37.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020*, 17-18 July, Bekasi, Indonesia (p. 71). European Alliance for Innovation.
- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 52-72.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota

- Pekanbaru. PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 5(2), 156-163.
- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 1(2), 304-317.
- Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR. PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis, 7(1), 1-9.
- Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO), 1(1), 120-126.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau.
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat, 3(2), 231-237.
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 6(2), 179-191.
- Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menangulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 9(1), 1-18.
- TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World, 6, 62-72.
- Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia (pp. 165-177).
- Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD:" Pendekatan Teori Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".

Regulasi

1. Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 11 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.

